



PEMUDIK KAPAL LAUT: Sejumlah penumpang menunggu keberangkatan di dalam kapal Pelni KM Labobar di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12/2024). PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mencatat sebanyak 266.002 pemudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah diberangkatkan selama periode 11-29 Desember 2024 atau mencapai 72,2 persen dari total proyeksi penumpang yang diperkirakan mencapai 507.057 orang.

Presiden Sambungan hal 1

Diberitakan sebelumnya, sebuah pesawat Azerbaijan Airlines yang terbang dari ibu kota Azerbaijan, Baku, ke Grozny, Chechnya, jatuh di dekat Kota Aktau, Kazakhstan, pada Rabu (25/12) hingga menewaskan 38 dari

67 penumpang dan awak pesawat. Sebanyak 29 orang di pesawat nahas tersebut dilaporkan selamat. Dua perwakilan dari Kejaksaan Agung Azerbaijan saat ini sudah berada di Grozny untuk berkoordinasi dengan pe-

jabat Komite Penyelidikan serta Kejaksaan Agung Rusia. Sementara itu, otoritas Rusia, Azerbaijan, dan Kazakhstan berkoordinasi secara erat untuk melakukan penanganan di lokasi jatuhnya pesawat. (Ant/Has)-f

BMKG Sambungan hal 1

Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pantai Pariaman, Padang Painsan 31 Desember-3 Januari), Jambi (Selat Berhala 31 Desember-5 Januari), Kepulauan Bangka Belitung (Pesisir Pangkal Pinang 31 Desember-1 Januari).

Provinsi Lampung (Bandar Lampung 31 Desember-3 Januari), Banten (Perairan Utara Tangerang, Selat Sunda Barat Pandeglang, Utara Serang, Selatan Pandeglang, Selatan Lebak pada 31 Desember-5 Januari).

Kemudian Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pesisir Utara Jakarta 31 Desember-3 Januari), Pesisir Utara Jawa Tengah (Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes pada 31 Desember-8 Januari), Selatan Jawa Tengah (Cilacap, Kebumen, Purworejo, Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY 30-31 Desember), Selatan Jawa Barat (Selatan Sukabumi dan Cianjur 30-31 Desember), Pesisir Jawa Timur

(Surabaya Pelabuhan, Surabaya Timur, Kalianget hingga Madura pada 28-31 Desember).

Pesisir Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Bima pada 29-31 Desember), Nusa Tenggara Timur (Utara dan Selatan Flores, Pulau Sumba, Pulau Sabu, Raijua, Rote, Pulau Timor).

Kalimantan Utara (Nunukan, Tarakan, Tanjung Selor 31 Desember-1 Januari), Kalimantan Timur (Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat 31 Desember-6 Januari), Kalimantan Selatan (Pesisir Sungai Barito, Kotabatu, Tanah Bumbu, Tanah Laut 29 Desember-4 Januari), Kalimantan Barat (Pesisir Kalimantan Barat 31 Desember-4 Januari), Kalimantan Tengah (Selatan Kota Waringin Barat meliputi Kubu, Keraya, Kumai 31 Desember-4 Januari).

Provinsi Sulawesi Selatan (Parepare, Sparemonde Makassar bagian Barat, Makassar, Pangkep, Selayar, Bonerate, Kalatota bagian Utara 30

Desember-2 Januari), Sulawesi Tengah (Perairan Palu-Donggala pada 31 Desember-1 Januari), Sulawesi Utara (Pesisir Sulawesi Utara, Bitung, Kepulauan Sangihe, Barat Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud 31 Desember-6 Januari).

Provinsi Maluku (Kota Ambon, Saumlaki, Kai, Aru dan Kabupaten Seram bagian Timur 1-3 Januari), Maluku Utara (Lolonda, Morotai, Tobelo, Ternate dan Taliabu pada 31 Desember-1 Januari) hingga Papua (Utara Jayapura, Kabupaten Sarmi, Biak, Serui, Waropen pada 30 Desember-1 Januari).

Menurut Eko, selain berpotensi mengganggu aktivitas aktivitas masyarakat karena permukiman tergenang air banjir rob, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kelancaran aktivitas pelaku usaha tambak garam hingga ikan air tawar/laut pada wilayah pesisir. (Ant/San)-f

Sinergi Sambungan hal 1

Sinergi fiskal-moneter yang sudah terbukti bermakna dalam mendorong ekonomi Indonesia kembali tumbuh normal pasca-Pandemi-Covid 19 perlu semakin diperkuat dan diperlebar ke depan, apalagi dalam menghadapi situasi dan kondisi global yang tidak menentu. Sinergi tersebut dapat dilakukan dalam pengendalian inflasi, defisit fiskal, stabilisasi Rupiah, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah, operasi moneter Bank Indonesia, dan efektivitas peraturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Sinergi fiskal-moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi, defisit fiskal, dan stabilisasi nilai tukar Rupiah (FTBI, 2024).

Dalam pengendalian inflasi, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan BI agar target inflasi terkendali sehingga tidak mengganggu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan pemerintah untuk pengendalian inflasi berupa instrumen fiskal seperti subsidi dan pengendalian harga komoditas strategis (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan), sementara BI berfokus pada kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas melalui instrumen operasi moneter.

Sesuai kaidah dalam pengelolaan fiskal berdasar UU No. 17/2003 tentang Ke-

uangan Negara -Pasal 12 (3) dan Pasal 17 (3), jumlah kumulatif defisit fiskal APBN dan APBD dibatasi paling tinggi 3% (tiga persen) dari PDB atau PDRB, sedangkan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibatasi paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari PDB atau PDRB. Dalam menjaga defisit fiskal ini, penerbitan SBN pemerintah harus dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kondisi pasar keuangan. Penerbitan SBN pemerintah harus diselaraskan dengan operasi moneter BI untuk menjaga likuiditas pasar.

Pengelolaan nilai tukar memerlukan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal. Intervensi BI di pasar valuta asing dan kebijakan fiskal yang mendukung daya tarik investasi asing, seperti insentif pajak atau pengelolaan utang luar negeri, akan berperan penting. Optimalisasi peraturan terkait DHE SDA dan Devisa Pembiayaan Impor (DPI) dapat membantu meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat stabilitas nilai tukar. DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumberdaya alam. DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar impor. DHE SDA dapat menjadi sumber penawaran devisa, sedang DPI dapat menjadi sumber permintaan devisa.

Penerapan yang konsisten, termasuk pengawasan dan insentif bagi eksportir dan importir menjadi elemen kunci. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan DHE SDA dan DPI guna mendukung optimalisasi perolehan informasi penawaran dan permintaan devisa pembayaran internasional seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.

Sinergi fiskal-moneter ini harus terus ditingkatkan melalui forum koordinasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antarotoritas Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan termasuk penanganan permasalahan perbankan dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan yang melibatkan instrumen fiskal dan moneter. Implementasi konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) oleh BI bersama dengan pemerintah, OJK, dan LPS terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia.

(Penulis adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI, dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama)-f

MANTAN DIRINTELMAM POLDA DIY DAN JATENG Brigjen Pol Kukuh Kalis Meninggal Dunia

MAGELANG (KR) - Mantan Dirintelkam Polda Jawa Tengah dan Polda DI Yogyakarta Brigjen Pol Kukuh Kalis Susilo meninggal dunia, Minggu (29/12). Pria kelahiran 28 Maret 1969 tersebut terakhir menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Tk II Baintelkam Polri.

Kepergian sosok yang pernah menjabat sebagai Kasat Intelkam Poltabes Yogyakarta itu meninggalkan duka mendalam bagi Kepolisian khususnya keluarga Intelkam.

Kukuh merupakan lulusan Akpol 1992 dan dibesarkan di intelijen. Ia pawai dalam meresolusi konflik dan menciptakan kondusivitas. Di antaranya penanganan kerusuhan di Temanggung pada Februari 2011. Begitu menjabat Kapolres, menggantikan



KR-Istimewa
Brigjen Pol Kukuh Kalis Susilo

Kapolres sebelumnya, ia langsung bergerak. Kondusivitas Temanggung kembali pulih.

Kukuh dinilai berhasil dalam bertugas sebagai Dirintelkam Polda DIY pada 2016. Demikian pula saat menjabat Dirintelkam Polda Jateng pada 2021, sehingga promosi menjadi Agen Intelijen Kepo-

lisian Tk II Baintelkam Polri pada 2023 hingga akhir hayat.

Jenazah Kukuh disemayamkan di rumah pribadi di Semarang untuk kemudian dimakamkan di Pemakaman Giridamoloyo, Kota Magelang, Senin (30/12) hari ini.

Rekan dan mantan anak buahnya di Kepolisian menyampaikan duka mendalam atas kepergian Kukuh Kalis.

"Beliau sosok Anggota Polri yang baik dan salah satu contoh teladan," kata Kopol Bambang Sulisty.

Kukuh juga dekat dengan insan media, dan saat menjabat Dirintelkam Polda DIY tidak sungkan bersilaturahmi ke redaksi media massa, di antara ke *Kedaulatan Rakyat*, sehingga terbina hubungan yang baik antara Polri dan insan media. (Osy)-f

Pesawat Sambungan hal 1

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa sejauh ini, tidak ada penumpang WNI dalam pesawat Jeju Air yang mengalami kecelakaan tersebut. Pemerintah dan Kedutaan Besar RI di

Seoul terus memantau perkembangan terkait musibah itu, kata Judha Nugraha, Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu.

(Ant/Has)-f

Saksi Sambungan hal 1

"Saya sedang memberitahu keluarga saya bahwa ada masalah dengan pesawat itu ketika saya mendengar ledakan keras," katanya.

Saksi lain, yang hanya diidentifikasi dengan nama belakang Cho mengatakan sedang berjalan kaki sekitar 4,5 kilometer dari bandara saat kecelakaan terjadi. "Saya melihat pesawat sedang menurun dan berpikir pesawat itu akan mendarat ketika saya melihat kilatan cahaya. Kemudian terdengar suara ledakan keras, diikuti asap di udara, lalu beberapa ledakan berturut-turut," tuturnya.

Saksi lainnya, Kim Yong-cheol (70) mengungkapkan, pesawat gagal mendarat pada percobaan pertama dan kembali berputar un-

tuk mencoba mendarat sebelum kecelakaan terjadi. Kim mengingat mendengar suara 'gesekan logam' dua kali sekitar lima menit sebelum kecelakaan. "Saya melihat ke langit dan melihat pesawat itu naik kembali setelah gagal mendarat, sebelum saya mendengar 'ledakan keras' dan melihat 'asap hitam' membubung ke langit," kenang Kim.

Pejabat menduga kegagalan roda pendaratan, kemungkinan akibat tabrakan dengan burung, menjadi penyebab kecelakaan. Kepolisian dan otoritas pemadam kebakaran telah memulai investigasi di lokasi kejadian untuk menentukan penyebab pasti insiden tersebut. (Ant/Has)-f

Prabowo Sambungan hal 1

Ya sudah telanjur dahulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu 'kan ajaran agama. Bertobatlah kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu ke mana kita akan cari," tegas Presiden.

Pada bagian lain, Presiden Prabowo mengungkapkan, pelaku korupsi tidak rela melihat pemerintah Indonesia berbenah untuk memperbaiki sistem yang ada. "Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela, tidak rela ada pemerintah Indonesia ingin membenahi diri, kita akan digoyang akan dibikin isu ini itu," kata Prabowo

Kepala Negara menekankan pentingnya dukungan rakyat untuk menghadapi tantangan

tersebut dengan meminta kesabaran dalam ikut berjuang demi pemerintahan yang bersih dan melayani. "Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan saya dipilih rakyat. Seluruh aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing," katanya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pertobatan bagi koruptor. Namun, ditegaskan lagi, pengembalian uang yang dicuri adalah hal utama. "Bukan saya maafkan koruptor. Tidak! Orang yang bertaubat, ya, tetapi kembalikan *dong* yang kau curi. Enak saja, sudah *nyolong*, bilang aku bertaubat, yang kau curi harus kau kembalikan," tegasnya lagi. (Ant)-f

Kasus Sambungan hal 1

Dalam keterangan persnya, ia meminta penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan kasus Harun Masiku tidak dibingkai melebar ke mana-mana menjadi pengadilan opini. Hasto, katanya, sudah menyatakan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selama ini dengan senantiasa datang tiap kali KPK melakukan pemanggilan.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berharap KPK bisa bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapa pun agar negara hukum bisa dijaga.

"Terhadap sanksi sejumlah pihak tentang tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada intervensi poli-

tik, tentu hal itu harus di-

jawab KPK agar maruah

KPK terjaga dengan baik,"

ujar Said. (Ant/Obi)-f



Prakiraan Cuaca Sambungan hal 1

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir

E-Government: Meningkatkan Partisipasi Warga Negara dalam Demokrasi dan Transparansi Pemerintahan



Monika Pretty Aprilia, MSi
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

MENJADI warga negara yang baik seringkali diukur dari sejauh mana kita mencintai tanah air dan bangsa dengan identitas nasional kita. Namun, menjadi warga negara yang baik juga melibatkan kewajiban administratif yang tak kalah penting, seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk, membayar pajak, dan berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Tak jarang, masyarakat mengeluhkan buruknya

layanan publik, mulai dari pelayanan di tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah yang lebih besar. Keluhan ini seringkali menjadi kritik yang mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan efisien.

E-government, atau pemerintahan berbasis internet, hadir sebagai jawaban untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut Latif Al-Hakim (2007), e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk membuat pemerintahan lebih mudah diakses, efektif, dan akuntabel. Di Indonesia, konsep e-government sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dimatangkan pada masa pemerintahan Megawati melalui Instruksi Presiden yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan (Senn, 2005).

Menurut Krishna Senn dalam bukunya *The Internet in Indonesia's New Democracy* (2005:91), ada empat tujuan utama yang ingin dicapai melalui e-government. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan publik dan informasi pemerintah. Kedua, untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor bisnis. Ketiga, menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog publik sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Keempat, untuk menciptakan akuntabel yang transparan dan akuntabel di semua level pemerintahan.

Komunikasi dalam e-government dapat dibagi menjadi empat ruang lingkup (Khadajah, 2013), yakni:

1. G2C (Government to Citizen): Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi, bertukar pendapat, serta memberikan saran dan kritik kepada pemerintah.
2. G2B (Government to Business): Komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, yang dapat mencakup informasi tentang aturan pajak, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.
3. G2G (Government to Government): Komunikasi antar lembaga pemerintah atau kementerian.
4. G2E (Government to Employee): Komunikasi antara pemerintah dan aparatur.

Dalam konteks partisipasi politik dan kehidupan demokrasi, e-government menjadi simbol nyata perubahan. Masyarakat kini tidak lagi menjadi golongan yang diam, seperti di era Orde Baru. Dengan e-government, warga negara dapat mengemukakan pendapat dan memberikan saran kepada pemerintah. Setiap kritik atau masukan, sekecil apapun, menjadi penting untuk memperbaiki kebijakan publik.

Lebih jauh lagi, e-government memberikan kesempatan yang sama

bagi semua kalangan untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan. Dunia maya memudarkan batasan-batasan identitas sosial dan ekonomi, karena setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mengakses informasi, seperti anggaran belanja negara (e-budgeting), dan turut mengawasi pengelolannya. Sosiawan (2008) menjelaskan bahwa e-government membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik, menghilangkan adanya diskriminasi antara warga negara. Dengan adanya transparansi, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis pun diharapkan semakin harmonis, serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

E-budgeting, salah satu aplikasi dari e-government, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun banyak warga yang masih memandang aparat pemerintah dengan kecurigaan, terutama terkait masalah korupsi, sedikit demi sedikit,

transparansi anggaran melalui e-government dapat mulai membangun kembali rasa percaya publik.

Namun, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, banyak aparat pemerintah yang enggan mempelajari teknologi, terutama mereka yang sudah senior atau menjelang pensiun. Sebaliknya, pegawai muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Kedua, infrastruktur yang mendukung e-government, seperti akses internet yang stabil, masih terbatas. Ketiga, penerapan e-government belum merata, hanya di beberapa kota besar, sementara daerah lain masih tertinggal.

Selain itu, meskipun masyarakat dapat menyampaikan pendapat melalui forum e-government, seringkali feedback dari pemerintah tidak atau tidak memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan tindak lanjut dan respons dari pemerintah untuk

memastikan bahwa dialog publik ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan kebijakan.

Pada akhirnya, demokrasi hanya bisa terwujud dalam forum terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk berbicara bebas dan menyampaikan opini mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Jürgen Habermas, dalam konsep public sphere, di mana ruang publik menjadi tempat bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam percakapan politik secara bebas dan setara. E-government adalah salah satu bentuk implementasi dari konsep ini, yang memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Gratis : Arko